

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) melalui mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR) dalam mendorong pemenuhan hak atas air bersih di Sri Lanka pada tahun 2023-2024. Fokus penelitian ini adalah bagaimana UPR berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan sekaligus sebagai aktor normatif yang memengaruhi kebijakan nasional Sri Lanka dalam sektor air bersih. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka terhadap dokumen resmi PBB, laporan UPR Sri Lanka, publikasi UNHRC, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPR berperan signifikan dalam meningkatkan komitmen normatif pemerintah Sri Lanka melalui rekomendasi internasional yang menekankan prinsip ketersediaan, kualitas, aksesibilitas, dan non-diskriminasi dalam pemenuhan hak atas air bersih. Selain itu, UNHRC melalui UPR berfungsi sebagai aktor pengarah agenda dan pengawas kebijakan dengan menciptakan tekanan normatif dan reputasional yang mendorong reformasi kebijakan air bersih, meskipun tanpa mekanisme pemaksaan hukum. Dengan demikian, UPR terbukti menjadi mekanisme efektif dalam memperkuat akuntabilitas negara dan mendorong pemenuhan hak atas air bersih sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya di Sri Lanka.

Kata Kunci: UNHRC, UPR, Hak Atas Air Bersih, Sri Lanka, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

This study analyzes the role of the United Nations Human Rights Council (UNHRC), through the Universal Periodic Review (UPR) mechanism, in promoting the fulfillment of the right to clean water in Sri Lanka during the 2023–2024 period. The focus of this research is on how the UPR functions both as an evaluative instrument and as a normative actor influencing Sri Lanka’s national policies in the water sector. This study employs a qualitative descriptive method, using a literature review of official United Nations documents, Sri Lanka’s UPR reports, UNHRC publications, and relevant academic literature. The findings indicate that the UPR plays a significant role in strengthening the Sri Lankan government’s normative commitments through international recommendations that emphasize the principles of availability, quality, accessibility, and non-discrimination in the fulfillment of the right to clean water. Furthermore, the UNHRC, through the UPR, acts as an agenda-setting and policy-monitoring actor by generating normative and reputational pressure that encourages policy reforms in the water sector, despite the absence of legally binding enforcement mechanisms. Therefore, the UPR is proven to be an effective mechanism for enhancing state accountability and promoting the fulfillment of the right to clean water as an integral part of economic, social, and cultural rights in Sri Lanka.

Keywords: UNHRC, UPR, Right to Clean Water, Sri Lanka, Human Rights.